



2019

# **SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2019

# **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

## **Tim Peneliti:**

Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd.

Meni Handayani, SS, M.Si.

Moh Rif'an Jauhari, S.E, MA.

Fitri Juanita M., S. Sos.

ISBN 978-602-0792-31-6

## **Penyunting:**

Nur Berlian Venus Ali, MSE

Dra. Ida Kintamani Dewi, M.Sc

## **Tata Letak:**

Joko Purnama

Genardi Atmadiredja

## **Penerbit:**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi:**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Dan Selain itu, bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Namun, mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan. Dalam upaya tersebut pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satunya membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat satuan pendidikan. Dalam memberikan masukan implementasi kebijakan tersebut

dilakukan kajian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Hasil rekomendasi kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan terbitnya kajian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ini kami ucapkan terima kasih kepada para peneliti yang sudah menyelesaikan penelitian ini. Demikian juga kepada semua *stakeholder* yang menerima kajian ini apabila ada saran masukan kami harapkan dapat disampaikan kepada kami untuk penyempurnaan kajian berikutnya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized name.

Muktiorio Waspodo

## KATA PENGANTAR

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mengamanatkan setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk membentuk SPMI dengan tujuan: (1) untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu, dan (2) untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu pendidikan pada dasarnya adalah mengawal satuan pendidikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Mutu pendidikan Indonesia hingga saat ini posisinya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun. Hal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi standar nasional pendidikan belum berjalan secara maksimal. Hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) bahwa perkembangan mutu sekolah/madrasah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terhadap mutu pendidikan.

Kajian sistem penjaminan mutu pendidikan pada prinsipnya dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan. Dengan

adanya sistem penjaminan mutu pendidikan maka akan memberikan dampak pada layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kajian ini, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada saran perbaikan dapat disampaikan kepada kami.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Tujuan Penelitian .....	18
C. Sasaran .....	19
D. Keluaran .....	19
E. Ruang Lingkup/Batasan .....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Mutu Pendidikan.....	21
B. Penjaminan Mutu Pendidikan.....	30
C. Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal ....	32
D. Penelitian Terdahulu .....	36
E. Penjaminan Mutu Pendidikan dari Negara Lain .....	39
F. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODOLOGI.....	47
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Teknik Pengumpulan Data .....	47
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Capaian Rapor/Peta Mutu SNP untuk Kesiapan Akreditasi .....	51

B. Hubungan Capaian SKL dengan Capaian Proses Pembelajaran dan Pendukung Proses Pembelajaran .....	62
C. Hubungan Capaian Proses Pembelajaran dengan Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru .....	69
D. Implementasi SPMP.....	71
BAB V SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	95
C. Rekomendasi Kebijakan.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Peringkat Akreditasi Sekolah/Madrasah sampai Tahun 2017.....	14
Tabel 2.	Daftar Tabel Sampel Penelitian.....	48
Tabel 3.	Hubungan Capaian Rapor Mutu dan Peringkat Akreditasi Standar Isi .....	53
Tabel 4.	Hubungan Capaian Rapor Mutu dan Peringkat Akreditasi Standar Proses .....	54
Tabel 5.	Standar Kompetensi Lulusan .....	55
Tabel 6.	Standar Tendik .....	56
Tabel 7.	Standar Sarana dan Prasarana.....	57
Tabel 8.	Standar Pengelolaan.....	58
Tabel 9.	Standar Pembiayaan.....	59
Tabel 10.	Standar Penilaian .....	60
Tabel 11.	Capaian SPMP menuju SNP pada Jenjang SD data Tahun 2016-2017 .....	61
Tabel 12.	Ringkasan Model Regresi I.....	63
Tabel 13.	Anova.....	64
Tabel 14.	Coeficients .....	65
Tabel 15.	Correlations.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian .....	45
Gambar 2. Model 1 Hubungan delapan SNP .....	63
Gambar 3. Model 2 Hubungan delapan SNP .....	66
Gambar 4. Model 3 Hubungan delapan SNP dengan Variabel Moderator. ....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai badan yang menentukan 8 standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan. Adapun standar-standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Kemudian pada tahun 2013 dengan diterapkannya Kurikulum 2013 maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 2A disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana

dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Dalam peraturan perubahan tersebut pemerintah menitikberatkan pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Artinya, bahwa semua standar harus memiliki kontribusi dalam pencapaian standar kompetensi lulusan. Untuk mengetahui kompetensi lulusan maka peserta didik sebelum menyelesaikan pembelajaran berhak untuk mengikuti ujian nasional (UN). Seperti yang tercantum dalam Pasal 69 bahwa (1) Setiap peserta didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur pendidikan nonformal kesetaraan berhak mengikuti UN dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Dalam perubahan kedua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa UN tidak menentukan kelulusan namun sebagai pemetaan mutu pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 bahwa hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:

- a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- dan c) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi diperlukan SNP yang menjadi pedoman bagi pelaksana atau penyelenggara pendidikan khususnya pada tingkat satuan pendidikan.

SNP diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya standar, dua orang guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Demikian juga dengan

proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (*output*) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Adanya standar atau hasil yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan komponen *input* dan proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih efektif sehingga hasilnya lebih optimal karena pembelajaran lebih terfokus. Menurut Mulyasa (2008:19) dengan adanya SNP diharapkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan yang mengarah pada kondisi sebagai berikut: 1) Meningkatkan prestasi peserta didik dengan menentukan secara jelas tentang apa yang harus diajarkan dan jenis performa apa yang diharapkan; 2) Menyamakan peluang, baik secara nasional, regional, maupun lokal; 3) Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati; 4) Menyediakan perlindungan pelanggan dengan menyuplai informasi yang akurat untuk peserta didik dan orang tua; dan 5) Memberikan peran penting untuk peserta didik, orang tua, guru-guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Menyadari pentingnya SNP maka setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia mengacu pada standar tersebut karena SNP merupakan batas kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Namun, berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan BAN-S/M pada tahun 2012-2017 untuk seluruh jenjang (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB) berdasarkan peringkat dapat diuraikan sebagai berikut: a) Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat A hanya tercapai 30,8%; b)

Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat B tercapai 53,5%; dan c) Persentase sekolah/madrasah dengan peringkat C sebanyak 14,3% (Abdul Mu'ti, 2017). Secara rinci dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Peringkat Akreditasi Sekolah/Madrasah sampai Tahun 2017

No	Jenjang	A	B	C	TT	Jumlah
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>	<b>40.851</b>	<b>90.450</b>	<b>22.223</b>	<b>2.203</b>	<b>155.727</b>
	SD	36.117	78.039	19.101	1.822	135.079
	MI	4.734	12.411	3.122	381	20.648
<b>2</b>	<b>SMP/MTS</b>	<b>15.831</b>	<b>22.588</b>	<b>8.414</b>	<b>946</b>	<b>47.779</b>
	SMP	12.311	14.317	5.427	515	32.570
	MTS	3.520	8.271	2.987	431	15.209
<b>3</b>	<b>SMA/MA</b>	<b>7.219</b>	<b>7.982</b>	<b>3.051</b>	<b>428</b>	<b>18.680</b>
	SMA	5.541	4.360	1.424	153	11.478
	MA	1.678	3.622	1.627	275	7.202
<b>4</b>	<b>SMK (PK)</b>	<b>11.293</b>	<b>12.247</b>	<b>3.216</b>	<b>308</b>	<b>27.064</b>
<b>5</b>	<b>SLB</b>	<b>421</b>	<b>747</b>	<b>152</b>	<b>25</b>	<b>1.345</b>
<b>Jumlah</b>		<b>75.615</b>	<b>134.014</b>	<b>37.056</b>	<b>3.910</b>	<b>250.595</b>
<b>Persentase</b>		<b>30,17</b>	<b>53,48</b>	<b>14,79</b>	<b>1,56</b>	
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	

Sumber: BAN S/M capaian Akreditasi 2012 s.d. 2017

Tabel 1. menunjukkan bahwa secara rata-rata hasil akreditasi yang memperoleh akreditasi A masih cukup rendah yaitu 30,2% dan untuk akreditasi B sebesar 53,5%. Capaian akreditasi A untuk jenjang SMA/MA masih rendah pada angka 7,2%.

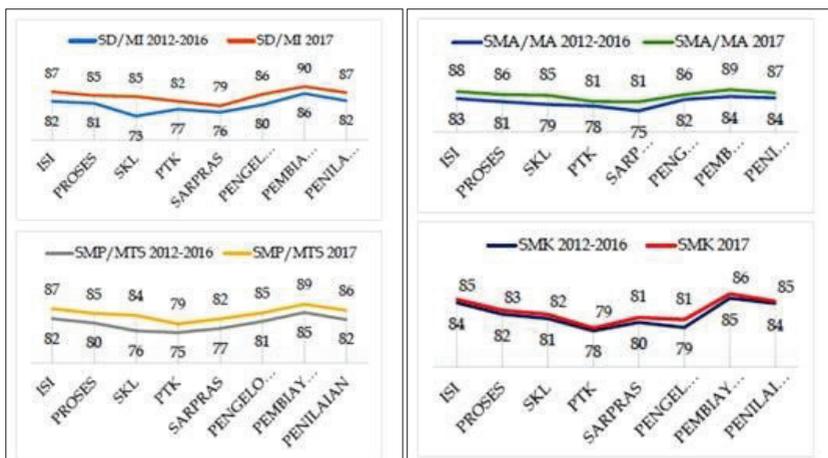
Artinya, bahwa mutu pendidikan secara rata-rata apabila dilihat dari hasil akreditasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Seperti pada PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian akreditasi A satuan pendidikan mencapai kriteria minimal. Jadi, satuan pendidikan walaupun sudah mencapai akreditasi A masih perlu meningkatkan standarnya lagi yang lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Seiring dengan perkembangan pendidikan, SNP sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Namun, mutu pendidikan Indonesia posisinya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun. Misalnya, tes yang diselenggarakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melalui *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2015 untuk mengukur kemampuan dasar siswa berusia 15 tahun bidang ilmu pengetahuan/sains, membaca dan matematika. Rata-rata nilai Indonesia masih di bawah rata-rata nilai OECD. Bidang ilmu pengetahuan/sains Indonesia masih mendapatkan nilai 403, membaca mendapatkan nilai 397 dan matematika mendapatkan nilai 386. Di antara ketiga bidang tersebut, bahkan skor membaca mengalami penurunan 2 poin jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, sedangkan nilai ilmu pengetahuan alam naik 3 poin dan matematika naik 4 poin. Skor yang dicapai Indonesia masih di bawah Thailand, di mana untuk rata-rata nilai ilmu pengetahuan/sains mencapai 421, membaca mencapai 409 dan matematika mencapai 415 (OECD, 2016).

Hal ini diduga bukan karena SNP yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi SNP belum berjalan

maksimal. Hasil akreditasi dari BAN-S/M bahwa perkembangan mutu sekolah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terhadap mutu pendidikan. Hal ini bisa di lihat dari hasil akreditasi ulang seperti pada di Grafik 1.

Grafik 1. Hasil Akreditasi Ulang



Grafik 1 menunjukkan bahwa kenaikan hasil akreditasi ulang secara rata-rata untuk angka akreditasi masih sangat kecil. Artinya, bahwa selama 5 tahun masa akreditasi sekolah belum melakukan perbaikan delapan SNP secara signifikan. Standar yang capaian nya paling rendah dari delapan SNP ada dua, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.

Banyak faktor yang membuat penerapan SNP tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Faktor ini dapat berasal dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Diduga pengaruh dari faktor internal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan SNP adalah (1) tenaga kependidikan, (2) daya dukung pimpinan, (3) sarana prasarana, (4) ketersediaan dana, dan (5) pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan SNP. Sedangkan faktor eksternal yang diduga menjadi penghambat pemenuhan SNP adalah (1) letak geografis sekolah, (2) daya dukung masyarakat, dan (3) kondisi perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam mendukung tercapainya SNP banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu upaya tersebut telah diterbitkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud, 2016) maka setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk membentuk SPMI. Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Permendikbud tersebut pada dasarnya untuk mendukung

pemerintah dalam mempercepat pemenuhan SNP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Puslitjakdikbud melakukan kajian isu aktual tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dalam implementasinya pada satuan pendidikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat SPMP. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis capaian rapor/peta mutu pendidikan terhadap pemenuhan SNP untuk kesiapan akreditasi.
2. Mengidentifikasi adanya hubungan antara capaian Standar Kompetensi Lulusan dengan capaian proses pembelajaran (Standar Isi, Proses, Penilaian pembelajaran), dan pendukung proses pembelajaran (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan).
3. Mengidentifikasi adanya hubungan antara capaian proses pembelajaran dengan kompetensi profesional dan pedagogik guru.
4. Menganalisis adanya kendala dan faktor pendukung dalam implementasi SPMP.

### **C. Sasaran**

Dalam kajian SPMP yang menjadi sasaran adalah delapan rapor mutu tentang SNP pada jenjang SD. Secara rinci sasaran kajian adalah sebagai berikut, 1) menganalisis rapor mutu terhadap pemenuhan SNP, 2) menganalisis capaian rapor mutu terhadap capaian proses pembelajaran, dan 3) melihat faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan.

### **D. Keluaran**

Keluaran dari kajian SPMP adalah laporan hasil kajian yang meliputi 1) menganalisis rapor mutu terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan, 2) menganalisis capaian rapor mutu terhadap capaian proses pembelajaran, dan 3) melihat faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan.

### **E. Ruang Lingkup/Batasan**

Ruang lingkup/batasan kajian SPMP adalah delapan SNP pada jenjang SD. Alasan menggunakan jenjang SD karena merupakan jenjang yang datanya masuk lebih banyak dan lengkap. Rapor mutu atau peta mutu pendidikan dikembangkan dari data hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari satuan pendidikan berdasarkan pengisian instrumen SPMP. Pengembangan peta mutu ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mutu Pendidikan

Istilah mutu atau kualitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *quality*, dalam kamus *the standard of something when it is compared to other things like it* (Oxford University Press, 2010:1198), memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama.

Berdasarkan istilah tersebut, dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: (Sudarwan, 2008: 53).

1. Memiliki kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
2. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain.
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.
4. Memiliki mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.
5. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran

tertentu.

Hakikatnya, mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output*, dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. *Outcome*, dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas (Usman, 2009:513). Sedangkan Mutu pendidikan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan SNP.

Pengertian mutu yang mencakup input, proses, dan atau output pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2001: 24), adalah bahwa mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan, prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Sowiyah, 2010: 24).

Berdasarkan hal tersebut, pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana

sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan (Usman, 2006: 41).

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, hal itu merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Menurut Arcaro (2005, 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Suryadi dan Tilaar (1995, 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

## 1. Karakteristik Mutu

Karakteristik mutu di dunia pendidikan, menurut Usman (2011: 79-82) menyebutkan bahwa mutu pendidikan memiliki 13 karakteristik yaitu:

a. Kinerja (*Performance*), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, lulus tepat waktu banyak.

b. Waktu wajar (*timeliness*), selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, waktu untuk naik pangkat wajar.

c. Handal (*reability*), misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, guru bekerja dari tahun ke tahun.

d. Daya tahan (*durability*), misalnya, meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat.

e. Indah (*aesthetics*), misalnya, interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik, taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik, guru membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah berpenampilan rapi.

- f. Hubungan manusia (*personal interface*), menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
- g. Mudah penggunaannya (*easy of use*), sarana prasarana dipakai. Misalnya, aturan-aturan mudah diterapkan. Buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu serta penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa.
- h. Bentuk khusus (*feature*), keunggulan tertentu. Misalnya, ada sekolah yang unggul dengan kegiatan ekstrakurikuler nya.
- i. Standar tertentu (*conformance to specification*), memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai akreditasi A (amat baik), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional.
- j. Konsistensi (*consistency*), keajekan, konstan, stabil. Misalnya, mutu sekolah dari dulu sampai sekarang.
- k. Seragam (*uniform*), tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
- l. Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan prima sehingga semua pelanggan merasa puas.
- m. Ketetapan (*accuracy*): ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

## 2. Syarat Mutu

Untuk memperoleh mutu yang baik sebagaimana yang telah di definisikan di atas, mutu harus memiliki syarat-syarat. Menurut Sudarwan (2008: 53) yang mendefinisikan mutu sebagai konteks, persepsi, *customer*, dan kebutuhan serta kemauan *customer* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan kebutuhan *customer* pada saat sekarang melainkan juga harus mengantisipasi kebutuhan *customer* yang akan datang.
- b. Mutu ditentukan oleh *customer*
- c. Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk memiliki efektivitas upaya guna memenuhi kebutuhan *customer* melalui karakteristik mutu.
- d. Kebutuhan dan kemauan *customer* harus diperhitungkan dalam desain produk atau jasa.
- e. Kepuasan *customer* merupakan syarat yang perlu bagi mutu dan selalu jadi tujuan proses untuk menghasilkan produk atau jasa.

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, merupakan hasil dari suatu proses pendidikan yang berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Menurut Arcaro (2005, 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan. Suryadi dan

Tilaar (1995, 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan oleh beberapa sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus masalah mutu bisa mencakup kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan (Sallis, 2006:103).

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah (Fattah, 2009: 90).

Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan guru

yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara profesional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompoten. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis, dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Sallis, 2006: 30-31).

Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, melainkan juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Menurut Sagala (2010: 35), sekolah yang berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru.

Indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan berdampak dari berbagai aspek, yaitu (1) efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), melainkan lebih menekankan pada internalisasi mengembangkan aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor dan kemandirian, (2) kepemimpinan kepala sekolah akan mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran melalui program yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, kreativitas, inovasi, efektif, mempunyai kemampuan manajerial, (3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (4) sekolah memiliki budaya mutu, (5) sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas dan dinamis karena *output* pendidikan merupakan hasil kolektif bukan hasil individu guna memperoleh mutu yang kompetitif, (6) sekolah memiliki kemandirian, yaitu kemampuan untuk bekerja secara maksimal dengan tidak tergantung petunjuk dari atasan dan memiliki sumber daya manusia yang potensial, (7) partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Keterkaitan dan keterlibatan pada sekolah harus tinggi dilandasi oleh rasa tanggung jawab melalui loyalitas dan dedikasi sebagai *stakeholders*, (8) sekolah memiliki transparansi, (9) sekolah memiliki kemauan perubahan (*management change*). Perubahan adalah peningkatan bermakna positif untuk lebih baik dalam peningkatan mutu pendidikan, (10) sekolah melakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan dan merupakan proses penyempurnaan dalam meningkatkan mutu keseluruhan, mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur dan sumber daya manusia, (11) sekolah memiliki akuntabilitas sebagai tanggung jawab terhadap keberhasilan program sekolah yang telah dilaksanakan, dan (12) *output* sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri dan memenuhi syarat pekerjaan (*qualified*) (Sagala, 2010:172).

Cukup beragam penjelasan terkait dengan mutu seperti yang telah dipaparkan di atas, baik itu secara karakteristik, syarat

dan faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan untuk mendefinisikan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan melalui pembelajaran yang diselenggarakan sesuai standar dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik maupun non akademik, sehingga mampu bersaing dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau dalam dunia kerja. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu tersebut maka perlu ditetapkan standar penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dengan begitu maka *input*, proses dan *output* serta *outcome* akan terjamin kualitasnya. Guna melaksanakan penjaminan dan pengembangan mutu supaya dapat menjawab tantangan perkembangan zaman maka perlu diterapkan melalui sebuah sistem, sehingga pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat lebih tertata.

## **B. Penjaminan Mutu Pendidikan**

Pemerintah telah menggulirkan SNP sebagai patokan mutu pendidikan. Dalam rangka mengukur mutu suatu satuan pendidikan maka dapat dilihat kesesuaian antara SNP dengan kondisi satuan pendidikan yang nyata. Untuk memastikan apakah SNP tersebut dilakukan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan maka perlu ada jaminan mutu dalam wadah penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan

bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu, seperti yang tertera dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk menjamin mutu pendidikan perlu juga ada pengawasan untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan.

Seperti yang disampaikan oleh Hoys, Bayne, Wood (2005:17) *The control of education is and always has been of fundamental importance to both local and central government. Local government is concerned because the schooling of the children of any community will have immediate implications for the health and wealth of that community. The central government likewise is concerned for the national interest to ensure a continuance of the developments in health, welfare, social and economic terms of the nation state. Therein lies the dichotomy. Who ought to have the overriding control, the ultimate power in terms of what is taught, how it is delivered and by whom, and what mechanisms should be involved in its monitoring, evaluation and review? In addition, how should the learners be managed?*

Kontrol pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kontrol dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikannya, disampaikan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalamnya pemantauan, evaluasi, dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya para pelajar agar berhasil.

Seperti yang disampaikan oleh Sallis (2005:17), pengontrol mutu atau pengawas biasanya melakukan kontrol mutu. Inspeksi dan pengujian adalah metode pengendalian kualitas

yang paling umum, dan banyak digunakan dalam pendidikan untuk menentukan apakah standar terpenuhi. Jaminan mutu berbeda dengan kontrol mutu. Selama proses berjalan, jaminan mutu untuk mencegah kesalahan yang terjadi berulang. Jaminan kualitas merancang kualitas ke dalam proses untuk mencoba memastikan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Untuk menjamin mutu barang atau jasa maka perlu ada sistem yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu yang memastikan proses berjalan sesuai dengan standar mutu yang dijaga dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu.

### **C. Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal**

Sistem penjaminan mutu di Indonesia salah satunya diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2016). Permendikbud ini menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan

berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas SPMI Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.

SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. SPMI Dikdasmen berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan. SPMI Dikdasmen dituangkan dalam lima dokumen, yaitu (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar dalam SPMI, (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI, dan (5) dokumen pendukung. Agar SPMI Dikdasmen berjalan dengan baik di satuan pendidikan, diperlukan unsur penjaminan mutu dalam bentuk tim penjaminan mutu sekolah yang independen di luar manajemen sekolah yang setidaknya terdiri dari unsur manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya.

SPMI Dikdasmen dilaksanakan dengan melalui lima siklus tahapan. Pertama, pemetaan mutu, dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan SNP.

Kedua, penyusunan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah dan rencana aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan rencana peningkatan mutu, melalui pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang di laksanakan dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Keempat, monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi juga menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, dengan demikian maka akan ada jaminan kepastian keberlanjutan terjadinya peningkatan mutu. Kelima, penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu, melalui penyusunan strategi peningkatan mutu dari capaian sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi guna membangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Keberhasilan SPMI Dikdasmen dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar. Terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMI Dikdasmen, yaitu

budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

SPME Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. SPME Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya. Siklus SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, siklus fasilitasi peningkatan mutu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, perencanaan peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam melakukan fasilitasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kemendikbud dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Fasilitasi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan provinsi dan berkoordinasi serta kerja sama dengan

Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. Pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan kabupaten/kota dan berkoordinasi serta kerja sama dengan Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud.

Kedua, siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah. Dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan, penetapan SNP dan penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Ketiga, siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BAN-S/M melalui evaluasi mutu satuan pendidikan, audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Dalam menjalankan kewenangannya BSNP dan BAN-S/M memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil kajian di bawah ini menunjukkan bahwa kajian SPMP yang dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat SPMP sangat diperlukan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud pada tahun 2015 dengan judul kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Dikmen menyimpulkan bahwa ketercapaian SNP pada jenjang SMA berdasarkan data sekunder hasil akreditasi BAN-S/M tahun 2014 menunjukkan bahwa ketercapaian yang terendah adalah Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) sebesar 75,9%, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebesar 78,2% dan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) sebesar 79,3%. Standar yang ketercapaian tertinggi adalah Standar Pembiayaan sebesar 83,9%.

Pada Standar Sarpras penyumbang rendahnya ketercapaian adalah kepemilikan perpustakaan dan kepemilikan laboratorium (fisika, kimia, biologi, bahasa, ruang konseling dan ruang UKS). Standar PTK penyumbang rendahnya ketercapaian adalah keberadaan tenaga kependidikan (tenaga administrasi, tenaga kepastakaan, laboran, dan layanankhusus) dan tenaga kependidikan yang ada belum sesuai dengan kualifikasi nya. SKL penyebab rendahnya ketercapaian standar karena sekolah belum memiliki kumpulan karya tulis siswa dari penugasan atau lomba dan bahkan ada sekolah yang tidak memiliki karya tulis siswa.

Pada analisis jalur, besar pengaruh (Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian melalui Standar Proses terhadap hasil belajar (UN) sebesar 2,75 pada jenjang SMA IPA. Artinya, bahwa hasil belajar (UN) dipengaruhi oleh (Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian melalui Standar Proses). Hal ini menunjukkan bahwa Standar Proses akan berpengaruh terhadap capaian belajar siswa apabila dipenuhinya (Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian). Besar pengaruh pada jenjang SMA IPS pada Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian melalui Standar Proses terhadap hasil belajar (UN) sebesar 2,28. Artinya, bahwa hasil belajar (UN) dipengaruhi oleh (Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian melalui Standar Proses). Hal ini menunjukkan bahwa Standar

Proses akan berpengaruh terhadap capaian belajar siswa apabila dipenuhinya (Standar Isi, Standar PTK, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian) (Puslitjakkidbud, 2015).

Hasil kajian Puslitjakkidbud pada tahun 2016 dengan judul kajian Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai Prediktor Mutu Sekolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta target sekolah yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah jenjang SMA yang di akreditasi oleh BAN-S/M pada tahun 2015, yakni sebanyak 1.306 sekolah (BAN-S/M, 2016) menyimpulkan bahwa status sekolah pencapaian SNP yang diukur melalui akreditasi sekolah menunjukkan bahwa SMA Negeri di tahun 2015 memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan SMA Swasta. Mutu Sekolah yang diukur melalui UN juga menunjukkan mutu SMA Negeri di tahun 2015 lebih tinggi jika dibandingkan dengan SMA Swasta. Secara umum pencapaian SNP sekolah jenjang SMA di tahun 2015 dikategorikan tinggi atau sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dari sebagian besar sekolah mendapatkan peringkat akreditasi A dan B (dengan rata-rata nilai akhir 80,46). Hal ini tidak selalu diikuti dengan pencapaian mutu sekolah yang tinggi pula. Terlihat persebaran mutu sekolah yang tercermin di dalam UN sangat bervariasi hasilnya. Di sejumlah provinsi, memiliki pencapaian SNP yang tinggi dan mutu sekolahnya di atas rata-rata nasional (tinggi). Namun, ada pula sekolah dengan pencapaian SNP yang tinggi, tetapi mutu sekolahnya di bawah rata-rata nasional (rendah). Sebaliknya, terdapat sekolah yang memiliki pencapaian SNP yang rendah, namun mutu sekolahnya di atas rata-rata nasional (tinggi). Secara umum terdapat pengaruh pencapaian SNP terhadap

mutu sekolah. Namun, kontribusi pencapaian SNP terhadap mutu sekolah tergolong rendah (hanya sebesar 7,7%). Terdapat 4 standar yang secara umum berpengaruh terhadap mutu sekolah. Standar yang berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah standar isi, SKL, PTK, serta Pengelolaan. SKL dan PTK berpengaruh positif terhadap mutu sekolah, sedangkan standar isi dan pengelolaan berpengaruh negatif terhadap mutu sekolah (Puslitjakdibud, 2016).

Perbedaan mutu sekolah menurut peringkat akreditasi, hanya berbeda pada sekolah dengan peringkat akreditasi A dibandingkan dengan sekolah dengan akreditasi B, C, maupun tidak terakreditasi. Sekolah dengan akreditasi B, C dan TT, perbedaan mutu sekolahnya tidak signifikan. Terdapat hubungan yang erat antar hasil ukur pencapaian antar standar SNP. Hal ini menggambarkan hasil pengukuran antar standar tersebut tidak saling independen sehingga jika salah satu standar terukur tinggi maka standar lain juga berpeluang besar mendapatkan skor yang tinggi pula. Hubungan antar standar yang paling erat adalah Standar Isi dengan SKL, serta Standar PTK dengan Standar Sarpras.

#### **E. Penjaminan Mutu Pendidikan dari Negara Lain**

*America*: Departemen Pendidikan di Amerika Serikat memiliki standar penjaminan mutu sekolah dan akreditasi (<https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-accreditation.html>). Penjaminan mutu pendidikan dan akreditasi merupakan proses yang digunakan dalam pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah dasar, lembaga pendidikan menengah, dan penyedia pendidikan lainnya memenuhi dan

mempertahankan standar minimum kualitas serta integritas mengenai administrasi sekolah, akademisi maupun layanan lainnya.

Program tersebut merupakan proses sukarela berdasarkan prinsip swakelola akademik. Sekolah, lembaga dan program *post-secondary* dalam institusi juga turut berpartisipasi dalam akreditasi. Pemerintah federal dan negara bagian (*state*) mengakui akreditasi sebagai mekanisme yang legitimasi institusional dan terprogram. Dalam istilah internasional, akreditasi oleh otoritas akreditasi ini telah diakui, diterima, dan digunakan di Amerika, yang kemudian dianggap setara dengan pengakuan dari negara lain bahwa lembaga penjaminan mutu dan akreditasi masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Tidak ada UU atau peraturan federal khusus yang mengatur pengakuan asosiasi yang menjamin mutu pendidikan atau mengakreditasi sekolah dasar dan menengah. Departemen Pendidikan AS tidak memiliki peran pengawasan sehubungan dengan akreditasi sekolah. Sebagian besar negara bagian sudah memiliki UU yang mengharuskan atau mendorong penjaminan mutu dan akreditasi untuk sekolah umum dan sekolah swasta yang disewa negara. Sekolah yang memiliki akreditasi dan mutunya bagus berdasarkan persetujuan negara dan pihak berwenang yang diakui di tingkat negara, sudah dianggap sebagai sekolah yang diakui dalam sistem pendidikan AS. Selain itu, sekolah swasta yang di akreditasi oleh asosiasi lain yang telah mendapatkan izin oleh Departemen Pertahanan Federal, Keamanan Dalam Negeri dan Negara juga dianggap layak, setara dan diakui mutunya.

**Europe:** Model penjaminan mutu pendidikan di Eropa dalam hal ini mencakup evaluasi dan akreditasi pada mata pelajaran,

bidang studi, program tertentu dan tingkat kelembagaan. Namun, penjaminan mutu pendidikan di Eropa dapat dicirikan dengan baik dalam proses Bologna. Salah satu tujuan dari proses Bologna ini adalah kerja sama negara-negara Eropa dengan tujuan mengembangkan kriteria dan metodologi yang sebanding. Pada tahun 2005, kerja sama ini mengarah pada adopsi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan di Eropa mengenai Standar dan Panduan untuk Jaminan Kualitas di Wilayah Pendidikan Tinggi Eropa atau "Standar dan Pedoman Eropa" (*European Standards and Guidelines*). ([http://ecahe.eu/w/index.php/Quality\\_assurance\\_and\\_accreditation\\_in\\_Europe](http://ecahe.eu/w/index.php/Quality_assurance_and_accreditation_in_Europe)).

Asosiasi Eropa untuk penjaminan mutu dalam pendidikan biasa disebut dengan ENQA. Anggota ENQA terdiri dari beberapa agen penjaminan mutu pendidikan dari negara-negara yang berpihak dan mengacu pada "Proses Bologna". Jaringan Eropa untuk Penjaminan Mutu Pendidikan didirikan pada tahun 2000 untuk mempromosikan kerja sama Eropa di bidang jaminan mutu. Pada tahun 2004, jaringan ini kemudian diubah menjadi sebuah Asosiasi. ENQA dianggap sebagai badan pembuat kebijakan utama dari komunitas yang menjamin mutu pendidikan di Eropa. Dalam kapasitas inilah ENQA berpartisipasi dalam proses Bologna yang sudah bekerja sama dengan negara-negara di Eropa dengan pengembangan metodologi sebanding.

Prosedur akreditasi di Eropa menjadi metode penting untuk menjamin mutu dan mutu eksternal. Akreditasi didefinisikan sebagai setiap keputusan yang diformalkan oleh otoritas yang diakui secara tepat, apakah lembaga pendidikan tinggi atau

program sesuai dengan standar tertentu. Konsorsium Eropa untuk akreditasi mendefinisikan akreditasi sebagai "keputusan formal dan independen, yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan/atau program memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan." Definisi ini juga mencakup beberapa penilaian mutu yang digambarkan sebagai "prosedur seperti akreditasi". Akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan dicapai melalui proses multi langkah; evaluasi diri atau dokumentasi yang diajukan oleh unit yang menjalani akreditasi; penilaian eksternal oleh para ahli independen; serta keputusan akreditasi. Keputusan akreditasi didasarkan pada penilaian eksternal. Keputusan akreditasi sendiri bersifat otoritatif dan menghasilkan "ya" (dengan atau tanpa kondisi) atau "tidak" penilaian dengan validitas terbatas.

*Asia*: Rabu 08 Desember 2010, 03:10 WIB Konferensi Limassol, Siprus. Sistem penjaminan mutu RI diakui di negara-negara *Asia-Europe Meeting (ASEM)*. *Quality assurance* (sistem penjaminan mutu) pendidikan di Indonesia semakin diakui dan mendapatkan perhatian positif dari negara-negara ASEM. Hal itu mengemuka dalam diskusi pada Konferensi Internasional ASEM bertajuk *Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects* di kota Limassol, Siprus. Dengan visi *smart and comprehensive intelligence*, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional terus mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan akreditasi terhadap program studi yang dimilikinya. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing.

Disebutkan, sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN, Indonesia juga terus berupaya

meningkatkan jumlah keterbalikan lembaga pendidikan baik dasar, menengah dan tinggi di Indonesia yang tergabung pada ASEAN *University Network* (AUN). Dalam pandangan peserta konferensi, penjaminan mutu di tingkat program studi, seperti yang dilakukan Indonesia lebih dapat mencerminkan kualitas dari sistem pendidikan di negara tersebut, karena dilakukan pada cakupan lebih kecil.

Di akhir konferensi, terdapat pandangan umum bahwa sistem penjaminan mutu yang ada pada lembaga pendidikan baik di Asia dan Eropa dapat terus ditingkatkan melalui pertukaran informasi dan pengalaman. Selain itu, muncul kesepahaman bahwa kerja sama penjaminan mutu bukan diarahkan menjadi suatu standarisasi yang *rigid*, melainkan mencari kesamaan dari sistem pendidikan yang bervariasi antara lembaga pendidikan di Asia maupun di Eropa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pertemuan merekomendasikan perlunya diselenggarakan pelatihan-pelatihan, *workshop* ataupun seminar di bawah kerangka ASEM untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama pendidikan antar kedua kawasan. Konferensi Internasional ASEM ini dihadiri oleh peserta dari 20 negara Mitra ASEM ditambah peserta dari ASEM *Education Secretariat*, perwakilan dari Komisi Eropa dan Asosiasi Universitas se-Eropa.

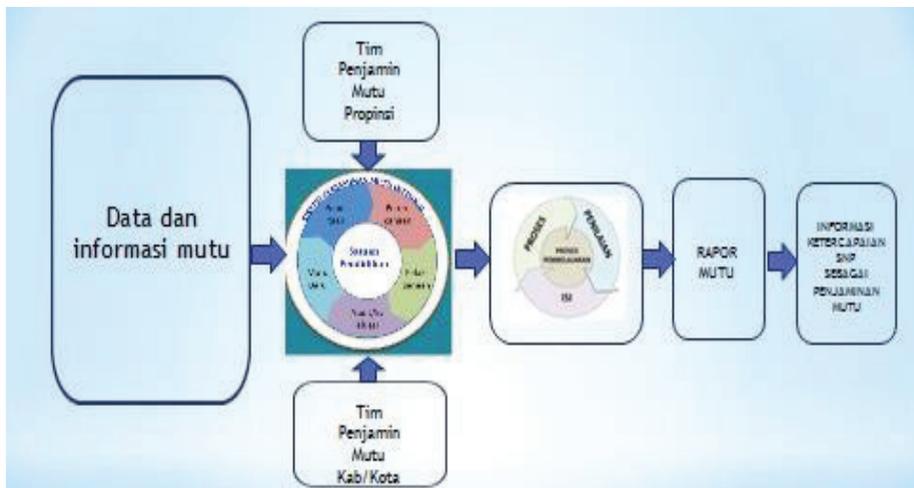
ASEM merupakan *platform* dialog informal antara Asia dan Eropa sejak 1996. Agendanya ditentukan pada pertemuan puncak dua tahunan ketika para pemimpin pemerintahan bertemu dan mendorong proses dialog ASEM untuk mengarah pada kerja sama berorientasi aktivitas konkrit yang saling menguntungkan. Proses informal ini dibarengi oleh mekanisme pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi untuk

membicarakan berbagai hal bersifat teknis yang menjadi perhatian bersama (<https://news.detik.com/berita/1510837/sistem-penjaminan-mutu-ri-diakui-negara-negara-asem/>).

## **F. Kerangka Berpikir**

Sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan lebih kepada melaksanakan standar isi, standar proses, SKL, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Namun, satuan pendidikan tidak dapat lepas dari memperhatikan standar PTK, standar pembiayaan dan standar sarpras dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Pelaksanaan SPMP yang sudah berjalan perlu dilihat kembali terutama hal yang berhubungan dengan manajemen pembelajaran yang meliputi standar isi, proses, dan penilaian. Ketiga hal tersebut bermula pada kemampuan guru dalam mengelola kelas, kemampuan kepala sekolah memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan menindaklanjuti serta diikuti oleh penjaminan mutu eksternal yang mendukung pelaksanaan SPMI yang ada di sekolah. Apa yang telah dilakukan sekolah-sekolah baik sekolah yang sudah mendapat label sekolah model maupun sekolah yang belum secara maksimal melaksanakan SPMP. Dari hasil evaluasi dapat diperoleh informasi baik dari data sekunder maupun data primer tentang pelaksanaan SPMP apakah sudah sesuai dengan skenario yang sudah dibuat.



Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian



## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian SPMP dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam kajian ini dilakukan analisis terhadap capaian rapor mutu penjaminan mutu pendidikan untuk mengetahui sejauh mana hasil rapor mutu dapat berkontribusi terhadap pemenuhan SNP. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari hasil pengumpulan data Dikdasmen tentang SPMP. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana rapor mutu dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan delapan SNP. Deskripsi data digunakan untuk mengetahui capaian rapor mutu terhadap capaian proses pembelajaran. Data yang dianalisis berasal dari hasil rapor mutu pelaksanaan SPMP. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap capaian proses belajar. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan SPMP. Data primer diperoleh hasil kuesioner dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan pihak dinas pendidikan.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder rapor mutu, yaitu hasil pengukuran mutu berdasarkan instrumen SPMP pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh dari Ditjen Dikdasmen,

Kemendikbud. Data primer dalam kajian ini dilakukan melalui penyusunan kuesioner dan FGD dengan pemangku kepentingan di sekolah dan dinas pendidikan di daerah. Kuesioner untuk mengetahui informasi tentang faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan SPMP.

Pengambilan sampel untuk pengumpulan data primer dilakukan secara *purposive*. Sampel dari kajian ini diambil pada sekolah-sekolah model yang sudah melaksanakan SPMI dengan pertimbangan bahwa sekolah model yang melaksanakan SPMI dapat memberikan informasi terhadap implementasi SPMI dan ketercapaian SNP. Berdasarkan hal tersebut diambil sampel daerah seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Tabel Sampel Penelitian

No	Nama Provinsi	Kota	Kategori Capaian Rapor mutu 2017
1	DIY	Yogyakarta	Rapor mutu tinggi
2	Kalimantan Utara	Tarakan	Rapor mutu rendah

### C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder capaian mutu rapor mutu dilakukan untuk menganalisis ketercapaian delapan SNP. Data diolah melalui analisis deskriptif kuantitatif untuk menunjukkan ketercapaian delapan SNP.

Di samping itu, seluruh data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif. Sehubungan dengan itu, berikut ini dikemukakan beberapa teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini.

Pertama, persentase yang digunakan untuk menghitung persentase setiap komponen kriteria, komponen, dan instrumen sebagai instrumen evaluasi ditetapkan berdasarkan pada frekuensi jawaban responden.

Kedua, menggunakan modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Alat statistik deskriptif ini membantu untuk mengonversi data kuantitatif menjadi data kualitatif. Di samping itu, untuk kepentingan deskripsi yang teliti dan penuh makna maka angka-angka statistik menjadi sumber pertama dalam melakukan analisis.

Data primer dianalisis secara deskriptif dengan menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana sehingga mudah mendapatkan gambaran hasil penelitian. Data kualitatif diolah untuk mengetahui pelaksanaan standar nasional terhadap faktor-faktor penunjang dan penghambat penerapan SNP dan untuk menemukan indikator-indikator kelayakan SNP.



## **BAB IV**

### **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menghasilkan kajian yang dapat memperkuat SPMP agar dapat memberikan dampak pada layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu (Republik Indonesia, 2003). Oleh karena itu, analisis dan pembahasan kajian ini dilakukan berdasarkan analisis data sekunder dan data hasil FGD yang diuraikan dalam bagian-bagian yang mencakup: 1) Capaian rapor/peta mutu SNP untuk kesiapan akreditasi, 2) Hubungan capaian SKL dengan capaian proses pembelajaran (isi, proses, penilaian pembelajaran), dan pendukung proses pembelajaran (PTK, Sarpras, Pengelolaan, dan Pembiayaan), 3) Hubungan capaian proses pembelajaran dengan kompetensi profesional dan pedagogik guru, dan 4) Analisis kendala dan faktor pendukung dalam implementasi SPMP.

#### **A. Capaian Rapor/Peta Mutu SNP untuk Kesiapan Akreditasi**

##### **1. Capaian Rapor/Peta Mutu pada Setiap Standar**

Analisis capaian masing-masing perlu dilakukan terlebih dahulu untuk persiapan pencapaian akreditasi sebagai indikator mutu pendidikan. Capaian masing-masing standar ini dianalisis berdasarkan data tahun 2017 dari BAN-S/M,

Kemendikbud. Hasil data capaian rapor mutu diperoleh dari hasil isian instrumen SPMP dan hasil akreditasi Sekolah Dasar sebanyak 33.664 sekolah.

Dari sejumlah Sekolah Dasar tersebut, dipetakan capaian rapor masing-masing SNP berdasarkan nilai indikator sebagaimana tertera dalam bentuk kategori I – V, di mana:

<b>Kategori</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nilai rerataan</b>
I	Menuju SNP 1	0 – 2,04
II	Menuju SNP 2	2,05 – 3,70
III	Menuju SNP 3	3,71 – 5,06
IV	Menuju SNP 4	5,07 – 6,66
V	Memenuhi SNP	6,67 – 7,00

#### a. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Untuk capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar isi disajikan dalam Tabel 4.1. Dari jumlah 33.535 sekolah terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 811 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih berada pada kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan Capaian Rapor Mutu dan Peringkat Akreditasi Standar Isi

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	-	-	-	-	-
Menuju SNP 4	7.847	15.684	2.487	222	26.240
Menuju SNP 3	1.221	4.024	1.107	132	6.484
Menuju SNP 2	131	437	166	26	760
Menuju SNP 1	10	24	13	4	51
<b>Jumlah</b>	9.209	20.169	3.773	384	33.535

Secara rinci terdapat 568 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 34 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar isi.

#### b. Standar Proses

Standar proses didefinisikan sebagai SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar proses disajikan dalam Tabel 4. Dari jumlah 33.278 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 507 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan Capaian Rapor Mutu dan Peringkat Akreditasi Standar Proses

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	4.434	8.457	1.374	134	14.399
Menuju SNP 4	4.408	10.750	2.090	193	17.441
Menuju SNP 3	165	559	173	34	931
Menuju SNP 2	80	251	109	16	456
Menuju SNP 1	9	25	13	4	51
Jumlah	9.096	20.042	3.759	381	33.278

Secara rinci terdapat 331 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 34 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar proses.

#### c. Standar Kompetensi Lulusan

SKL berkaitan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi SKL disajikan dalam Tabel 5. Dari jumlah 33.429 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 657 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	1.496	2.704	471	53	4.724
Menuju SNP 4	7.385	16.528	2.998	282	27.193
Menuju SNP 3	160	503	166	26	855
Menuju SNP 2	96	338	106	16	556
Menuju SNP 1	17	50	29	5	101
Jumlah	9.154	20.123	3.770	382	33.429

Secara rinci terdapat 434 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 67 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk SKL.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar PTK ini berkaitan dengan kriteria pendidikan penjabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar PTK disajikan dalam Tabel 4.4. Dari jumlah 33.457 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 27.667 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Standar Tendik

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	0	0	0	0	-
Menuju SNP 4	0	0	0	0	-
Menuju SNP 3	2.345	3.177	260	8	5.790
Menuju SNP 2	6.703	16.420	3.031	277	26.431
Menuju SNP 1	125	532	480	99	1.236
<b>Jumlah</b>	9.173	20.129	3.771	384	33.457

Secara rinci terdapat 23.123 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 657 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar PTK.

#### e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar sarpras disajikan dalam Tabel 7. Dari jumlah 33.597 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 4.315 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Standar Sarana dan Prasarana

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	0	0	0	0	
Menuju SNP 4	0	0	0	0	
Menuju SNP 3	8.156	17.679	3.143	304	29.282
Menuju SNP 2	652	1.724	486	54	2.916
Menuju SNP 1	403	818	153	25	1.399
Jumlah	9.211	20.221	3.782	383	33.597

Secara rinci terdapat 2.376 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 1.221 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar sarpras.

#### f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah salah satu dari SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar pengelolaan disajikan dalam Tabel 8. Dari jumlah 33.580 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 1.469 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Standar Pengelolaan

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	0	0	0	0	-
Menuju SNP 4	8.198	16.319	2.600	236	27.353
Menuju SNP 3	784	3.050	836	88	4.758
Menuju SNP 2	190	738	292	47	1.267
Menuju SNP 1	43	99	48	12	202
Jumlah	9.215	20.206	3.776	383	33.580

Secara rinci terdapat 928 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 142 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar pengelolaan.

### g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan ini berkaitan dengan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Untuk capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar pembiayaan disajikan dalam Tabel 9. Dari jumlah 33.596 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 1.116 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Standar Pembiayaan

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	145	308	39	6	498
Menuju SNP 4	7.630	17.512	3.073	276	28.491
Menuju SNP 3	1.119	1.802	496	74	3.491
Menuju SNP 2	309	572	176	27	1.084
Menuju SNP 1	6	19	7	-	32
Total	9.209	20.213	3.791	383	33.596

Secara rinci terdapat 881 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 25 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar pembiayaan.

#### h. Standar Penilaian

Standar penilaian ini berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Capaian rapor mutu dan peringkat akreditasi standar penilaian disajikan dalam Tabel 10. Dari jumlah 33.417 sekolah, terdapat sekolah yang terakreditasi A atau B sebanyak 970 sekolah tetapi dalam penilaian rapor mutu masih kategori menuju SNP 2 atau menuju SNP 1 seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Standar Penilaian

Capaian Rapor Mutu	Peringkat Akreditasi				Total
	A	B	C	TT	
Memenuhi SNP	1,183	2,184	342	43	3,752
Menuju SNP 4	6,907	14,345	2,392	209	23,853
Menuju SNP 3	913	3,041	798	90	4,842
Menuju SNP 2	111	429	156	27	723
Menuju SNP 1	38	120	76	13	247
Jumlah	9,152	20,119	3,764	382	33,417

Secara rinci terdapat 540 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 2 dan terdapat 158 sekolah yang terakreditasi A atau B masuk dalam kategori menuju SNP 1. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakselarasan antara pemberian peringkat akreditasi dan penilaian capaian rapor mutu untuk standar penilaian.

## 2. Rekap Capaian SPMP Jenjang SD

Dari seluruh standar-standar yang telah dicapai pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendidikan terkait dengan mutu pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar masih belum menunjukkan mutu yang baik. Berdasarkan data dari capaian SPMP per standar maka disusun daftar capaian SPMP menuju SNP pada jenjang SD data Tahun 2016-2017 seperti pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian SPMP menuju SNP pada Jenjang SD data Tahun 2016-2017

Standar	Nilai	Kategori	M1	M2	M3	M4	SNP	Jumlah
Isi	5.54	****	51	761	6,491	26,361	-	33,664
Proses	6.40	****	51	457	934	17,449	14,773	33,664
SKL	5.96	****	101	560	866	27,203	4,934	33,664
PTK	3.18	**	1,236	26,470	5,958	-	-	33,664
Sarpras	4.14	***	1,399	2,918	29,347	-	-	33,664
Pengelolaan	5.62	****	202	1,270	4,781	27,411	-	33,664
Pembiayaan	5.70	****	32	1,085	3,525	28,515	507	33,664
Penilaian	5.81	****	247	729	4,855	23,926	3,907	33,664
Ket: * M1 menuju SNP-1      *** M 3 Menuju SNP - 3      Mencapai SNP ** M2 menuju SNP-2      **** M 4 Menuju SNP - 4								

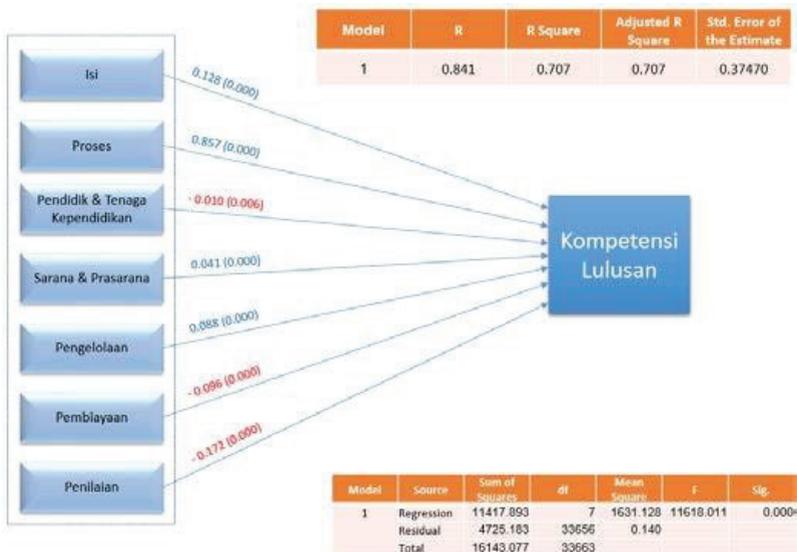
Data Tabel 11 menunjukkan bahwa standar yang belum memenuhi SNP ada 4, yaitu standar isi, standar PTK, standar sarpras, dan standar pengelolaan. Sebagian dari Sekolah Dasar ada yang telah memenuhi standar juga ada 4, yaitu standar proses, SKL, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Namun, sebagian besar belum memenuhi standar apabila dilihat dari penilaian rapor mutu.

Hal ini diduga bahwa penilaian rapor mutu digunakan untuk melihat ketercapaian secara keseluruhan dari setiap standar dari beberapa responden sebagai data diagnostik. Instrumen SPMP dengan melihat cakupan 1) Standar, 2) Indikator, 3) Sub indikator, dan 4) Butir pertanyaan. Responden SPMP ditujukan kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik dan perwakilan orang tua. Pengukuran standar dilakukan oleh BAN-S/M untuk akreditasi ketercapaian setiap standar. Perangkat akreditasi disusun berdasarkan kisi-kisi yang memuat; 1) Standar, 2) Komponen, 3) Aspek, 4) Indikator, 5) Butir pertanyaan, dan 6) Petunjuk teknis. Responden kepala sekolah, guru dan lebih pada pembuktian kepemilikan dokumen standar.

Dengan demikian, supaya hasil penilaian rapor mutu dapat memberikan prediksi kekurangan ketercapaian pada setiap standar maka instrumen atau perangkatnya perlu dilakukan sinkronisasi sehingga data rapor mutu sekaligus dapat dijadikan dasar pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan

## **B. Hubungan Capaian SKL dengan Capaian Proses Pembelajaran dan Pendukung Proses Pembelajaran**

Pada model 1 digunakan asumsi bahwa capaian SKL dipengaruhi secara langsung oleh capaian 7 Standar lainnya sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model 1 Hubungan delapan SNP

Model hubungan ini diperiksa dengan *multiple regression analysis*. Seberapa baik variabilitas dalam capaian SKL dipengaruhi oleh variabilitas dalam capaian 7 standar lainnya (isi, proses, PTK, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pembelajaran) disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Ringkasan Model Regresi I

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 <sup>a</sup>	.707	.707	.37470

a. Predictors: (Constant), smp\_Penilaian, smp\_PendidikTendik, smp\_Sarpras, smp\_Pembiayaan, smp\_Pengelolaan, smp\_Isi, smp\_Proses

Dari Tabel 12 dapat diperoleh informasi bahwa capaian rapor mutu pada 7 standar mampu memprediksi capaian SKL sebesar 70,7%. Sisanya sebesar 29,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain, selain capaian ke-7 standar tersebut.

Secara bersama-sama, capaian rapor mutu pada 7 standar berkontribusi signifikan terhadap capaian SKL berdasarkan *analysis of variance* yang disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Anova

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11417.893	7	1631.128	11618.011	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4725.183	33656	.140		
	Total	16143.077	33663			

a. Dependent Variable: *spmp\_KompetensiLulusan*

b. Predictors: (Constant), *spmp\_Penilaian*, *spmp\_PendidikTendik*, *spmp\_Sarpras*, *spmp\_Pembiayaan*, *spmp\_Pengelolaan*, *spmp\_Isi*, *spmp\_Proses*

Pengaruh masing-masing capaian rapor mutu pada 7 standar terhadap capaian SKL.

1. Standar isi: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );
2. Standar proses: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );
4. Standar sarpras: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );
5. Standar pengelolaan: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );
6. Standar pembiayaan: berpengaruh positif dan signifikan ( $\text{sig} < 0.05$ );

7. Standar penilaian: berpengaruh positif dan signifikan (sig < 0.05).

Tabel 14. Coefficients

**Coefficients<sup>a</sup>**

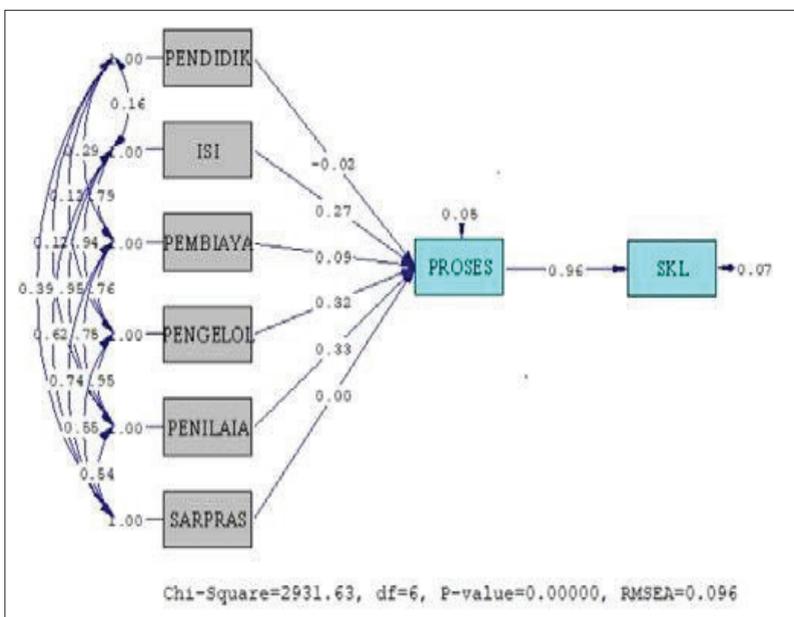
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.671	.024		27.735	.000
	spmp_Isi	.128	.006	.136	20.450	.000
	spmp_Proses	.857	.008	.849	110.773	.000
	spmp_PendidikTendik	-.010	.004	-.008	-2.731	.006
	spmp_Sarpras	.041	.004	.038	9.461	.000
	spmp_Pengelolaan	.088	.005	.110	17.125	.000
	spmp_Pembiayaan	-.096	.004	-.102	-25.001	.000
	spmp_Penilaian	-.172	.005	-.224	-32.172	.000

a. Dependent Variable: spmp\_KompetensiLulusan

### 1. Hubungan Delapan Standar Berdasarkan Capaian Rapor Mutu

Pada tahun 2017 Tim Kerja Ditjen Dikdasmen telah mengumpulkan data sekolah model maupun sekolah bukan model berjumlah 52.976 sekolah. Karakteristik data yang diperoleh terdiri delapan standar nasional masing-masing standar terdiri dari indikator dan sub indikator. Data yang diolah agregat setiap SNP.

Hubungan antar 8 SNP juga dianalisis dengan menggunakan anggapan bahwa capaian SKL dipengaruhi secara langsung hanya oleh capaian standar proses, sedangkan capaian standar proses dipengaruhi secara langsung oleh capaian 6 standar lainnya. Model 2 hubungan antar 8 standar ini diilustrasikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Model 2 Hubungan delapan SNP

*Standardize Solution (Factor Loading) (N= 52.976)*

a. Dari ke-6 standar (PTK, isi, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan sarpras), hanya standar sarpras yang pengaruhnya tidak signifikan terhadap proses. Ke-5 standar lainnya signifikan secara statistik.

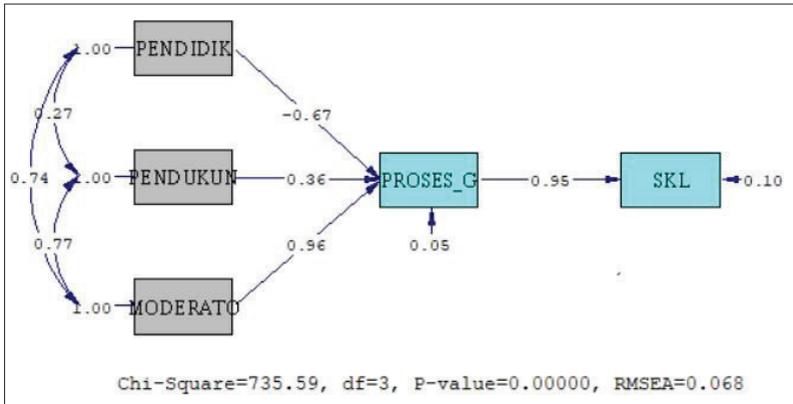
b. Model tersebut menunjukkan hanya pencapaian standar proses memiliki pengaruh yang signifikan dan paling bermakna terhadap pencapaian standar SKL.

Model tersebut menunjukkan bahwa standar PTK, isi, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan sarpras, memiliki pengaruh kecil terhadap standar proses. Standar proses memiliki pengaruh secara signifikan terhadap SKL. Hal ini

diduga karena standar yang paling utama dalam mempengaruhi SKL pada tingkat sekolah dasar, yaitu standar proses yang diperankan oleh guru. Hal ini sesuai dengan perkembangan anak bahwa anak pada jenjang sekolah dasar masih perlu banyak bimbingan secara langsung yang diperankan oleh guru. Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menjadi tokoh sentral untuk memberikan bimbingan kepada anak usia sekolah dasar. Keberhasilan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dapat diduga lebih banyak dipengaruhi oleh guru yang profesional.

Walaupun 6 standar (PTK, isi, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan sarpras) memiliki pengaruh rendah, namun standar tersebut tetap memiliki kontribusi penting terhadap berjalannya proses pembelajaran karena proses belajar dapat berlangsung dengan optimal apabila dilengkapi dengan sarana yang memadai.

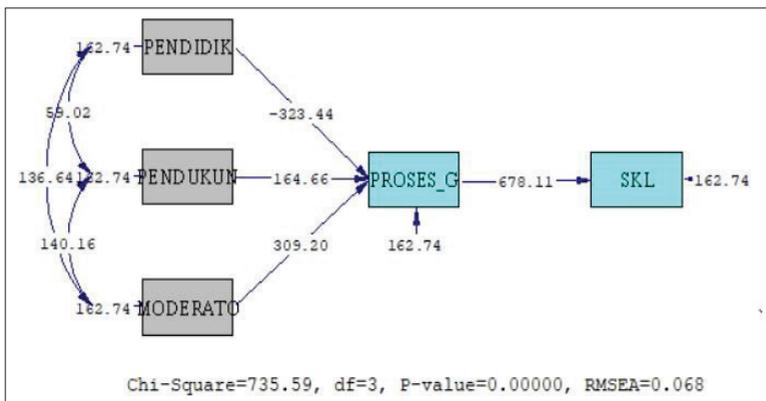
Gagasan ini diuji dengan model hubungan yang diilustrasikan dalam Gambar 4 di mana variabel moderator, yang merupakan perkalian antara variabel pendidik dan variabel pendukung, di asumsikan memberikan pengaruh tambahan pada capaian standar proses.



Gambar 4. Model 3 Hubungan delapan SNP dengan Variabel Moderator.

#### Standardize Solution (Factor Loading)

Dari hasil pengujian statistik terhadap model ini diperoleh informasi berikut.



*T- values (Signifikansi)*

a. Variabel moderator (PTK x Pendukung) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian standar proses. Artinya, pengaruh pencapaian standar PTK terhadap proses pembelajaran (isi, proses, penilaian) terbukti dapat diperkuat dengan pencapaian standar pendukung (sarpras, pengelolaan, pembiayaan).

b. Pencapaian standar proses selanjutnya juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian SKL. Semakin tinggi pencapaian standar proses, maka semakin tinggi pula pencapaian SKL.

Berdasarkan uji model ini variabel moderator yang merupakan perkalian dari variabel pendidik dan variabel pendukung (sarpras, pengelolaan, pembiayaan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran (isi, proses, penilaian). Demikian juga variabel proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap SKL. Artinya, SKL pada jenjang sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan proses pembelajaran dan peran guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

### **C. Hubungan Capaian Proses Pembelajaran dengan Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru**

Hubungan antara capaian proses pembelajaran dengan kompetensi profesional dan pedagogik guru diperiksa dengan menghitung koefisien korelasinya dengan hasil seperti disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Correlations

**Correlations**

		Proses	pedagogik	profesional
Proses	Pearson Correlation	1	.076**	.091**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	52871	8954	8954
pedagogik	Pearson Correlation	.076**	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	8954	8970	8970
profesional	Pearson Correlation	.091**	.724**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	8954	8970	8970

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Hubungan antara capaian proses dengan kompetensi profesional bernilai positif (0.091) dan signifikan pada level 0.05. Artinya, setiap peningkatan kompetensi profesional guru, akan diikuti dengan peningkatan proses pembelajaran. Meskipun hubungan kedua variabel tersebut termasuk kategori lemah.
2. Hubungan antara capaian proses dengan kompetensi pedagogik juga bernilai positif (0.076) dan signifikan pada level 0.05. Artinya, setiap peningkatan kompetensi pedagogik guru, akan diikuti dengan peningkatan proses pembelajaran. Meskipun hubungan kedua variabel tersebut termasuk kategori lemah.

Berdasarkan hasil pengukuran hubungan antara kompetensi profesional, kompetensi pedagogik terhadap proses pembelajaran yang menunjukkan hubungan signifikan. Artinya, bahwa proses belajar dapat berjalan efektif maka peran kunci

ada pada guru. Oleh karena itu, kompetensi profesional dan pedagogik guru dapat memberikan kontribusi pada peningkatan mutu proses pembelajaran.

## **D. Implementasi SPMP**

### **1. Analisis Guru**

- a. Perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran setelah adanya SPMI

- 1) Kota Tarakan

Berdasarkan penuturan guru (Hasnah, S. Ag, Guru SDN Utama 2 Tarakan) dalam FGD yang diadakan di Dinas Pendidikan Kota Tarakan, menyatakan bahwa di Kota Tarakan terdapat perubahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran setelah adanya SPMI. Perubahan yang terjadi adalah siswa mulai memahami tentang materi yang akan diajarkan. Kemudahan tersebut karena siswa telah terbiasa memperoleh informasi melalui internet. Pendapat guru tersebut diperkuat oleh Sumarsih, S.Pd, guru pada SDN 049 Tarakan yang menyatakan bahwa sekolah menjadi lebih baik, lebih siap, dan lebih mantap dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di sekolah sehingga hasil belajar siswa lebih meningkat walaupun masih perlu beberapa perbaikan. Hal senada juga dikemukakan oleh Bernardus Gao Kolin, Guru SDN 024 Tarakan bahwa dengan adanya SPMI guru dan siswa berinteraksi lebih baik. Jadi, dengan adanya SPMI sekolah menunjukkan adanya perubahan terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru.

Dengan demikian, akan berpengaruh pada capaian hasil belajar yang lebih efektif.

## 2) Kota Yogyakarta

Terdapat perubahan secara signifikan di SDN Timuran dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa sebagai subjek pembelajaran peningkatan karakter siswa. Selain itu, di SDN Bhayangkara dengan adanya SPMI proses pembelajaran menjadi lebih terarah sesuai RPP yang sudah di buat bersama tim kelompok kerja guru (KKG) guru kelas di sekolah dengan pembinaan dari kepala sekolah. Begitu juga yang terjadi di SDN Tegalmulyo, terjadi perubahan pada peserta didik, mereka bertambah semangat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menambah mutu anak di bidang akhlak dan kebiasaan yang mendidik, ini dipengaruhi oleh program di sekolah setelah adanya SPMI. Kemudian SD Muhammadiyah Nitikan melakukan perubahan dengan melakukan proses pembelajaran lebih terkondisikan dan terorganisasi dengan lebih baik, perangkat pembelajaran juga lebih siap sehingga guru siap dalam proses belajar mengajar dan akan berimbas pada pencapaian hasil yang lebih maksimal pada siswa jika dibandingkan dengan sebelum adanya SPMI.

### b. Pembinaan yang diterima guru dalam proses pembelajaran setelah adanya SPMI

Pembinaan yang diterima guru setelah adanya SPMI di SDN 2 Tarakan terdapat beberapa pembinaan dan pelatihan di antaranya dilakukan oleh Kementerian Agama seperti pelatihan K-13 serta *workshop* tentang RPP dan penilaian.

Begitu juga yang terjadi di SDN 049 Tarakan, bentuk pembinaan oleh kepala sekolah mengenai kelengkapan administrasi mengajar dan penanganan kedisiplinan di sekolah dan pembinaan dalam proses KBM yang dilakukan oleh SDN 012 dan SDN 024 antara lain pembinaan mengenai RPP dan penilaian, pengaktifan KKG di sekolah, serta pengenalan dan alur SPMI, kemudian ikut serta dalam diklat pendidikan, pembinaan mental serta penyelenggaraan pengajian rutin. Secara keseluruhan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan lembaga penyelenggara lain sangat bagus untuk kemajuan dan peningkatan kemampuan guru. Begitu halnya di SDN Timuran, terdapat supervisi berkala yang diselenggarakan oleh kepala sekolah, mengenai materi perangkat pembelajaran KDM dan *workshop*, penyelenggara sekolah dengan materi perangkat pembelajaran sekolah unggulan. Kemudian pembinaan di SDN Bhayangkara, yaitu aktifnya KKG guru kelas yang dilaksanakan oleh sekolah dengan materi penyusunan perangkat pembelajaran, serta diskusi KKG guru kelas yang membahas tentang materi dan proses pembelajaran serta materi evaluasi pembelajaran. Begitu juga yang terjadi SDN Tegalmulyo, adanya sosialisasi/*workshop*, penyelenggaraan LPMP dengan materi program sekolah, proses pembelajaran RPP, dan program unggulan yang akan diadakan. Bentuk pembinaan di SD Muhammadiyah Nitikan, yaitu *workshop* pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi, secara keseluruhan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru sudah sangat baik dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran.

c. Supervisi yang diterima guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Supervisi dan pembinaan yang diterima guru oleh kepala sekolah dan pengawas di SDN Utama 2 Tarakan per tahun adalah tindak lanjut memperbaiki kekurangan yang ada di dalam kelas, kemudian pengawas melakukan pembinaan saat masuk ke dalam kelas. Di SDN 049 Tarakan, kepala sekolah melakukan supervisi 2 kali setahun menindaklanjuti pengarahannya dan kelengkapan administrasi kelas, kemudian pengawas melaksanakan tindak lanjut dari program tersebut. Selain itu, supervisi yang terjadi di SDN 012 Tarakan oleh kepala sekolah adalah melakukan pembinaan 2 kali dalam setahun dan menindaklanjuti perbaikan RPP penilaian dan teknik pembelajaran, kemudian pengawas melakukan tindak lanjut dengan melengkapi administrasi atau pembelajaran di kelas. Supervisi yang diterima guru oleh kepala sekolah di SDN 024 Tarakan selama 1 sampai 2 kali setahun adalah tindak lanjut pembekalan dalam proses pembelajaran, kemudian pengawas melaksanakan tindak lanjut ke kepala sekolah.

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya yang sangat baik oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi dalam proses pembelajaran. Begitu pula yang terjadi di Yogyakarta, supervisi yang diterima guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di SDN Timuran antara lain adanya pengawasan dan pembinaan oleh kepala sekolah yang dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Tindak lanjutnya adalah perbaikan KBM, pengawas melakukan supervisi 2 kali dalam 1 tahun dan tindak lanjutnya adalah perbaikan KBM. Selanjutnya, di SDN

Bhayangkara, kepala sekolah melakukan supervisi 2 kali dalam 1 tahun dengan melakukan tindak lanjut, yaitu perbaikan proses pembelajaran, kemudian pengawas melakukan supervisi 2 kali dalam 1 tahun dengan tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran. Supervisi di SDN Tegalmulyo antara lain pejabat supervisi yaitu kepala sekolah melakukan supervisi 6 kali setahun dengan melakukan tindak lanjut diskusi dan perbaikan, kemudian pengawas melakukan supervisi 6 kali setahun dan melaksanakan tindak lanjut program. Begitu juga di SD Muhammadiyah Nitikan, supervisi dilakukan oleh kepala sekolah 1 bulan dua kali kemudian menindaklanjuti revisi perangkat pembelajaran yang belum lengkap, dan pengawas melakukan supervisi 1 bulan sekali serta tindak lanjut revisi dan pembinaan. Supervisi dilakukan secara teratur baik itu dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas dengan menyesuaikan program dan tahapan yang ada.

d. Manfaat yang diperoleh dengan SPMI

Manfaat yang diperoleh dengan adanya SPMI di SDN 2 Tarakan, yaitu adanya kesamaan persepsi dalam rangka memajukan sekolah dan adanya peningkatan kedisiplinan guru dan siswa di sekolah tersebut. Manfaat yang diterima oleh SDN 049 Tarakan antara lain masalah-masalah internal yang terjadi di sekolah dapat ditangani dengan baik, adanya peningkatan mutu pendidikan serta keterbukaan antar warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan TU semakin baik.

Kemudian di SDN 012 Tarakan terlihat bahwa sistem pendidikan lebih terarah dan efisien, sementara mutu/*output* lebih baik secara akademik maupun non akademik, dan kerja sama antar guru-sekolah-orang tua terjalin dengan harmonis.

Dengan adanya SPMI di SDN 024 Tarakan, ada perubahan baik seperti sinergitas komponen dalam satuan pendidikan menjadi kokoh, kemudian setiap pemangku kepentingan juga memahami 8 SNP. Dari keseluruhan hasil masukan per sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI, peningkatan mutu pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya SPMI Yogyakarta, yaitu adanya peningkatan kompetensi guru, adanya peningkatan karakter siswa, dan terjadi peningkatan prestasi non akademik di bidang seni. Kemudian yang terjadi di SDN Bhayangkara adalah terciptanya perbaikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan terciptanya perbaikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Manfaat yang diperoleh SDN Tegalmulyo yaitu menjadi lebih memahami dalam membuat program sekolah dan program untuk anak didik serta lebih banyak mendapatkan implikasi dari program tersebut. Kemudian manfaat yang diterima SD Muhammadiyah Nitikan adalah mulai meningkatnya proses kegiatan belajar-mengajar, adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses belajar-mengajar dan adanya peningkatan kecakapan guru dan tenaga pendidik.

e. Sarana yang diperlukan untuk mendukung SPMI

Sarana dukungan dalam penyelenggaraan SPMI di SDN 2 Tarakan antara lain ruang kelas yang nyaman dan fasilitas PBM dalam kelas yang lengkap. Begitu juga yang terjadi di SDN 049 Tarakan yaitu perlunya penambahan ruang kelas karena yang selama ini belum mencukupi karena masih digunakan untuk 3 *Shift*, dan perlunya pembangunan aula

sekolah untuk mendukung lancarnya kegiatan yang ada di sekolah. Sarana yang dibutuhkan SDN 012 Tarakan antara lain ruang belajar yang belum mencukupi dan tenaga kependidikan yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian di SDN 024 Tarakan diperlukan adanya aula/auditorium, buku-buku pembelajaran serta penambahan anggaran untuk bimbingan teknis (bimtek) kepada pemangku kepentingan.

Sarana dalam mendukung SPMI di Yogyakarta antara lain di SDN Timuran yaitu sarana pendukung sekolah unggul bidang seni yang buku referensi PBM, LCD, dan komputer. Kemudian sarana pendukung di SDN Bhayangkara adalah buku-buku pedoman guru, buku-buku penunjang pembelajaran dan laboratorium. Sarana dan prasarana yang mendukung SPMI SDN Tegalmulyo antara lain untuk KBM alat peraga yang untuk dalam kelas dan alat peraga yang untuk KBM di luar sekolah. Dukungan sarpras yang ada di SD Muhammadiyah Nitikan, yaitu sarana pembelajaran seperti audio visual, komputer/printer untuk membuat kelengkapan administrasi serta ruang kelas yang memadai untuk kegiatan pembelajaran.

f. Kendala terbesar terkait dengan implementasi SPMI

Kendala yang dihadapi SDN 2 Tarakan terkait implementasi SPMI di sekolah dasar antara lain belum memadainya dan masih adanya kendala keterjangkauan akses internet yang ada di sekolah, dan di dalam ruang kelas masih terasa panas sekali karena belum ada alat pendingin. Selanjutnya, kendala di SDN 049 Tarakan yaitu masih adanya tenaga pendidik yang belum mempunyai kesadaran untuk memajukan sekolah dan kurangnya sarana-prasarana di sekolah,

misalnya kurangnya ruang kelas, belum ada aula, belum ada ruang untuk belajar agama Islam dan Katolik. Hambatan implementasi SPMI di SDN 012 Tarakan yaitu kurangnya kesadaran dari pihak sekolah dalam rangka pemenuhan standar sarpras serta tindak lanjutnya. Hambatan yang ada di SDN 024 Tarakan adalah belum adanya kemauan keras sekolah untuk mencoba memperbaiki dan memenuhi standar sarpras.

Begitu juga di Yogyakarta kendala terkait SPMI di SDN Timuran antara lain sarpras yang dimiliki sekolah, kemudian yang di SDN Bhayangkara yaitu instrumen terlalu rumit, terkadang tidak sesuai dengan pernyataan di lapangan. Berikutnya kendala implementasi SPMI di SDN Tegalmulyo adalah kurang lengkap dan kurang memadainya fasilitas untuk KBM. Terakhir adalah kendala dalam pelaksanaan SPMI di SD Muhammadiyah Nitikan yaitu adanya kegiatan di luar belajar mengajar sehingga pembuatan administrasi sering terlambat.

## **2. Kepala Sekolah**

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan berperan dalam tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Dalam implementasi SPMI di tingkat satuan pendidikan, perlu disusun dokumen SPMI yang meliputi dokumen kebijakan, dokumen standar dan dokumen formulir. Rencana peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Guna menjalankan peran tersebut, tingkat satuan pendidikan membentuk tim penjaminan mutu.

Tim penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan mempunyai beberapa tugas utama, di antaranya, yaitu (1) mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan; (2) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; (3) melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; (4) melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut setiap satuan pendidikan memiliki variasi permasalahan yang dihadapi. Diterapkannya SPMI diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu sekolah melalui perbaikan pemenuhan 8 SNP. Keterlibatan kepala sekolah dalam proses penyusunan dan validasi isian instrumen SPMI di sekolah dapat dijadikan gambaran kemampuan teknis dan manajerial kepala sekolah.

Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam mengerahkan semua potensi sekolah menentukan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikian juga dengan potensi sumber daya yang tersedia dapat berpengaruh terhadap terwujudnya penjaminan mutu internal.

a. Pengisian Instrumen SPMP Mempersiapkan Dokumen Kelengkapan delapan SNP

Supaya implementasi SPMI berjalan lancar sosialisasi dan pembimbingan kepada kepala sekolah dan tim SPMI sekolah telah dilakukan di Yogyakarta, meskipun dirasa pengarahan dari pengawas belum mendetail. Namun, sudah ada buku panduan yang diberikan kepada sekolah yang bisa dipelajari secara mandiri terkait mekanisme cara pengisian instrumen SPMP. Dari hasil FGD terlihat bahwa dokumen kelengkapan delapan SNP telah dijadikan sebagai acuan dalam mengisi instrumen SPMI. Hal itu dilakukan agar memudahkan dalam pengisian dan mendapatkan data yang valid sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Peran Kepala Sekolah dalam Pengisian Instrumen SPMP.

Keterlibatan langsung kepala sekolah dalam pengisian instrumen SPMP tidak sama antar sekolah. Sebagian besar pengisian dilakukan oleh tim yang ditugaskan. Tim terdiri dari guru dan pegawai TU, terutama yang menangani pemenuhan delapan SNP.

c. Manfaat Pemetaan Mutu SPMP terhadap Perbaikan Pemenuhan Delapan SNP

1) Standar Isi

Hasil pengukuran dapat dijadikan panduan bagi guru dalam perbaikan penyusunan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan adanya hasil pengukuran maka tergambar apa yang sudah dan belum dipenuhi, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi guna melakukan perbaikan melalui

penyusunan pada tahun berikutnya. Selain itu, juga memudahkan melihat pada *item* mana yang harus diprioritaskan, dan nantinya bisa dimasukkan dalam penyusunan RKAS.

## 2) Standar Proses

Standar proses hasil pengukurannya dapat meningkatkan pemahaman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang juga berpengaruh terhadap perbaikan penyusunan perangkat pembelajaran. Melalui pengukuran SPMP dapat dijadikan bahan evaluasi proses belajar mengajar, sehingga dapat menjadi acuan perbaikan oleh guru karena instrumen SPMP erat kaitannya dengan *input* dan *outcome* dalam standar proses.

## 3) Standar Kompetensi Lulusan

Hasil pengukuran SPMP dijadikan panduan bagi sekolah dalam menentukan standar kelulusan. Hasil pengukuran ini juga memacu guru untuk lebih memahami kebutuhan peserta didik dan memperhatikan hal-hal yang mampu mengembangkan potensi siswa. Dengan diketahuinya hasil pengukuran ini dapat menjadi bahan menganalisis kekurangan untuk menyusun strategi mencapai SKL.

## 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kinerja serta kualifikasi PTK dapat diketahui dari hasil pengukuran SPMP, sehingga bisa menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu SDM melalui

pemenuhan dan peningkatan kinerja serta kualifikasinya.

#### 5) Standar Sarana dan Prasarana

Dari hasil pengukuran SPMP bisa menunjukkan sarpras yang harus dilengkapi untuk pemenuhan standar pelayanan minimum. Dengan begitu maka bisa menentukan prioritas sarana dan prasarana yang harus dilengkapi melalui perencanaan pengadaannya yang dituangkan dalam RKAS.

#### 6) Standar Pengelolaan

Data hasil pengukuran SPMP dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan sekolah guna melakukan perbaikan dalam pemenuhan standar pengelolaan. Dengan pengukuran ini kepala sekolah lebih memahami alur pengelolaan sekolah agar lebih efektif, sehingga pengelolaan manajerial sekolah bisa menjadi lebih baik.

#### 7) Standar Pembiayaan

Data SPMP dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran melalui penyusunan RKAS, serta dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pemenuhan standar pembiayaan. Dari hasil pengukuran SPMP juga dapat dijadikan acuan penentuan skala prioritas kebutuhan pembiayaan untuk peningkatan prestasi siswa.

#### 8) Standar Penilaian

Dapat dijadikan panduan dalam menyusun strategi dan standar penilaian kepada peserta didik. Dengan

pengukuran SPMP, guru juga lebih memahami langkah- langkah penilaian serta berusaha melaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

d. Validasi Instrumen SPMP

Validasi instrumen SPMP sebelum dikirim oleh operator secara *online* ke pusat dilakukan oleh staf TU dengan kepala sekolah. Dalam melakukan validasi berkoordinasi dengan tim yang menyusun instrumen tersebut. Di Yogyakarta, validasi yang dilakukan di bawah bimbingan pengawas pembina.

e. Kendala Terbesar yang Dihadapi Terkait Implementasi SPMI

Kendala yang dirasakan kepala sekolah dalam implementasi SPMI di sekolah yaitu kurang adanya kemauan dan kerja sama. Tim SPMI yang telah dibentuk kurang berjalan maksimal karena tugas guru sudah terlampau banyak. Sekolah dibebani dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan seperti sekolah adiwiyata, sekolah model, sekolah model kemaritiman, sekolah literasi, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan lalu lintas, karakter, kegiatan gugus dan KKG. Program-program di sekolah itulah yang menyita banyak waktu, sedangkan kemampuan SDM di sekolah (PTK) juga terbatas.

f. Pembinaan yang Diperlukan untuk Mengembangkan SPMI

Kepala sekolah menginginkan untuk dilakukan beberapa pembinaan supaya sekolah dapat mengimplementasikan SPMI dengan baik. Selain pembinaan terhadap pemenuhan

delapan SNP pembinaan terkait audit internal dan cara membuat evaluasi diri sekolah juga diperlukan, karena penguasaan materi oleh Tim SPMI di sekolah masih kurang. Pembinaan dapat dilakukan oleh LPMP dan pengawas melalui *workshop* yang dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan. Guna mendukung implementasi SPMI di sekolah, hampir semua kepala sekolah yang mengikuti FGD mengatakan perlunya dukungan sarpras yang memadai di sekolahnya, seperti perlengkapan komputer, printer dan jaringan internet.

### **3. Pengawas Sekolah**

Pemetaan mutu dalam SPMP mulai dirintis oleh Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Kemendikbud, 2016). Pemetaan mutu tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen penjaminan mutu yang berisi ratusan pertanyaan. Instrumen ditujukan kepada responden kepala sekolah, guru, siswa, pengawas dan komite sekolah. Jawaban sekolah terhadap instrumen SPMP secara aturan di validasi oleh pengawas dan dikirim ke pusat secara *online*.

Peran pengawas sebagai pembina, supervisi dan pelaku validasi sangat penting dalam proses penjaminan mutu pendidikan di sekolah selain peran LPMP yang ada di daerah. Beberapa hal yang dibahas dalam sistem penjaminan mutu berkaitan dengan manfaat SPMI terhadap perbaikan pemenuhan 8 SNP dan proses validasi oleh pengawas terhadap isian instrumen SPMI di sekolah beserta kendala yang dihadapi.

a. Manfaat Pemetaan Mutu SPMP terhadap Perbaikan Pemenuhan Delapan SNP

1) Standar Isi

Mengetahui sejauh mana capaian standar isi, indikator- indikator apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai dijadikan prioritas program yang akan datang (tahun berikutnya) Selain itu, untuk melihat kekurangan kurikulum yang dibuat sekolah, dievaluasi dan ditingkatkan.

2) Standar Proses

Mengetahui kegiatan belajar, mengajar berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan dari rambu-rambu yang telah dibuat. Melalui pengukuran SPMP dalam instrumen yang diisi erat sekali dengan standar proses baik *input* maupun *outcome*. Selain itu, untuk mengukur mutu sekolah supaya lebih baik.

3) Standar Kompetensi Lulusan

Pada standar SKL melalui pengukuran SPMP dapat dianalisis sejauh mana keberhasilan satuan pendidikan dalam mengelola kelulusan apakah sudah maksimal atau belum. Dapat mengetahui capaian lulusan dari segi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan kompetensi mana yang belum mencapai SNP untuk dijadikan program tahun yang akan datang.

#### 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Masih terdapatnya latar belakang PTK yang kurang relevan dengan tugas pokok fungsinya. Perlu peningkatan, melalui pendidikan dan pelatihan dan bentuk lainnya. Dapat mengetahui standar PTK apakah sudah terpenuhi atau belum, kalau sudah diusahakan untuk melebihi standar nasional.

#### 5) Standar Sarana dan Prasarana

Sarpras yang ada di satuan pendidikan sudah sesuai dengan standar minimalnya atau belum sehingga dapat mengetahui sarpras di satuan pendidikan itu bila dibandingkan dengan standar berada pada posisi mana. Pada umumnya di Kota Tarakan pada standar sarpras masih ada sekolah-sekolah yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Keadaan yang masih kurang dibuat catatan, seperti ruang kelas, dan ruang guru.

#### 6) Standar Pengelolaan

Melalui pengukuran SPMP sekolah dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan sesuai ketentuan. Sekolah/kepala sekolah lebih memahami alur pengelolaan dan berusaha lebih sungguh-sungguh menerapkan manajemen sekolah. Memastikan pengelolaan di satuan pendidikan berjalan, sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat dan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah dibuat dan dibandingkan dengan SNP.

## 7) Standar Pembiayaan

Sekolah memberikan pelayanan subsidi silang dan dapat melakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai dengan ketentuan standar pembiayaan. Sumber dana sekolah seperti BOS dan BOSDA masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaannya.

## 8) Standar Penilaian

Melalui hasil pengukuran SPMP pada standar penilaian dapat dilihat aspek ranah penilaian dilakukan dengan mengikuti prosedur. Penilaian apa yang dilakukan guru bisa terdeteksi dalam rapor mutu. Selain itu, proses penilaian yang dilakukan di satuan pendidikan sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian hasil belajar atau belum dan sejauh mana capaiannya.

### b. Validasi Instrumen SPMP

Validasi instrumen dilakukan oleh pengawas sebelum dikirim secara *online* ke pusat oleh operator. Di Kota Yogyakarta satu pengawas memvalidasi sebanyak sekolah yang dibina. Satu pengawas kurang lebih membina 21-25 sekolah. Berbeda dengan di Kota Tarakan satu pengawas melakukan validasi di sekolah binaan sebanyak satu pengawas untuk 9 sekolah.

### c. Cara validasi isian instrumen SPMP yang dilakukan pengawas.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh pengawas dalam memvalidasi isian instrumen. Pengawas mengecek

instrumen yang telah diisi oleh responden;

- 1) Memastikan semua responden mengisi instrumen;
- 2) Jumlah responden apakah sudah sesuai ketentuan;
- 3) Apakah masing-masing instrumen sudah terisi semua;
- 4) Tanggal berapa dilakukan *entry* data;

d. Kendala dalam melakukan validasi

- 1) Sekolah binaan yang banyak yang berdampak pada banyaknya instrumen yang harus di validasi;
- 2) Banyaknya butir instrumen/pertanyaan di setiap responden;
- 3) Instrumen siswa banyak yang belum dimengerti oleh yang bersangkutan.

e. Kendala terkait Implementasi SPMI

- 1) Pemahaman guru dan kepala sekolah tentang setiap siklus dalam sistem SPMI karena bagi sekolah SPMI belum begitu lama diberlakukan sehingga pemahamannya belum maksimal;
- 2) Banyaknya butir instrumen dan istilah-istilah yang belum semua dipahami oleh siswa dan komite sekolah yang menjadi responden;
- 3) Terkadang adanya pernyataan yang kurang sesuai disampaikan kepada responden.

Pertanyaan kepala sekolah dan pengawas relatif sama, sehingga dapat membingungkan saat memasukkan data. Untuk memperbaiki implementasi SPMI di sekolah maka perlu adanya pembinaan dan penguatan kompetensi SDM yang ada di sekolah. Perlu ada pendampingan yang berkesinambungan untuk sekolah baik dari LPMP maupun dari dinas pendidikan yang terkait dan monitoring rutin

dilakukan. Selain itu, KKG sekolah dan KKG gugus di intensifkan serta dilakukan pembinaan khusus bagi tim pengembang sekolah.

#### **4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)**

LPMP merupakan lembaga penjaminan mutu pendidikan yang berada di daerah dan merupakan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 8, poin 3 disebutkan bahwa LPMP mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen di daerah. Seperti dalam FGD di Yogyakarta salah satu perwakilan dari LPMP mengemukakan bahwa LPMP telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program SPMI dengan melihat *input*, *proses*, dan *output* terhadap ketercapaian hasil proses belajar. Demikian juga LPMP melakukan evaluasi terhadap proses pendampingan yang dilakukan fasilitator daerah (fasda)/widyaiswara terhadap pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.

Menurut perwakilan LPMP bahwa SPMI yang dilakukan di sekolah apabila dilaksanakan dengan tertib akan dapat memberikan dampak dalam kesiapan sekolah dalam pemenuhan SNP. Hal ini karena setiap pengisian instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan untuk mengukur rapor mutu, sekolah akan menyiapkan dokumen kelengkapan delapan SNP. Hal ini menyebabkan sekolah dengan otomatis mengetahui kekurangan dalam SNP yang ada di sekolah untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap ketercapaian SNP.

Dalam implementasi SPMI menurut perwakilan dari LPMP Yogyakarta terdapat tiga kendala, yaitu 1) Keterbacaan instrumen SPMP pada tingkat SD, karena masih ada butir-butir yang belum dapat dipahami oleh kepala sekolah SD, sehingga menyulitkan dalam pengisian; 2) Kesulitan sekolah dalam menyusun perencanaan dalam pemenuhan mutu pada RKS/RKAS. Menurut kepala sekolah ketika ditemukan permasalahan dalam rapor mutu, pihak sekolah menganggarkan dalam RKS/RKAS tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana pada BOS dan ada kesulitan merealisasikan program perbaikan mutu; dan 3) Menetapkan waktu agar semua sekolah bisa berkumpul, karena banyaknya kegiatan baik di tingkat sekolah ataupun LPMP menjadi kendala LPMP dalam pembinaan dengan pihak sekolah.

## **5. Dinas Pendidikan**

Dalam implementasi SPMP di tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang salah satunya mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pemerintah Daerah membentuk Tim Penjamin Mutu yang anggotanya paling sedikit terdiri atas unsur: a) bidang pada dinas pendidikan; b) pengawas sekolah; dan c) dewan pendidikan.

Seperti hasil FGD di Kota Yogyakarta, perwakilan dari Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa Kota Yogyakarta

telah menerbitkan SK Tim Penjamin Mutu Pendidikan Yogyakarta. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Yogyakarta, yaitu melaksanakan *workshop* penulisan silabus muatan lokal, pengembangan instrumen pendidikan agama berbasis afeksi, dan kegiatan matrikulasi mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Kegiatan sangat positif dapat memberikan kontribusi langsung kepada guru dalam meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan belajar mengajar.

Menurut Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bahwa dengan diterapkannya SPMI bermanfaat dalam mempersiapkan sekolah dalam pemenuhan SNP. Tim SPMI di tingkat sekolah melakukan identifikasi setiap standar maka akan memberikan informasi terhadap mutu pada setiap standar. Dengan demikian, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu dapat melakukan identifikasi kekurangan pada setiap standar di sekolah yang bersangkutan.

Kendala yang dirasakan menurut Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih belum semua *stakeholder* di tingkat sekolah memahami pentingnya untuk bersama-sama dalam pemenuhan kebutuhan sekolah dalam mendukung ketersediaan dan ketercukupan sarpras, SDM, dan pembiayaan. Hal tersebut menjadi tugas semua komponen pendidikan dalam menggerakkan semua unsur untuk mendukung terwujudnya mutu pendidikan sehingga anak didik dapat terlayani pendidikan yang bermutu.



## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **A. Simpulan**

**B**erdasarkan data dan informasi yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari 33.664 Sekolah Dasar pada Tahun 2016 dan 2017 untuk penilaian rapor mutu menunjukkan bahwa seluruhnya masih belum memenuhi kategori SNP dengan nilai rata-rata 6,67-7,00. Dari standar-standar nasional yang ditetapkan, baru standar proses, SKL, standar pembiayaan dan standar penilaian yang sudah berada pada level menuju SNP 4. Standar-standar lain masih berada pada level di bawah menuju SNP 4. Nilai yang paling rendah dicapai adalah Standar PTK (3,18), rendahnya angka ini lebih kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi sesuai dengan ketentuan standar. Nilai yang paling tinggi dicapai oleh standar proses (6,40), angka ini menunjukkan bahwa secara umum proses pembelajaran di satuan pendidikan sekolah dasar telah berjalan dengan baik.
2. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa SKL merupakan standar yang sangat penting dalam mewujudkan mutu pendidikan secara nasional. Untuk mendukung capaian SKL, dibutuhkan peran dan kontribusi capaian proses pembelajaran (isi, proses, penilaian pembelajaran), dan pendukung proses pembelajaran (PTK, sarpras, pengelolaan, dan pembiayaan). Hasil analisis secara statistik

menunjukkan bahwa hampir seluruh standar berpengaruh pada SKL. Semakin tinggi pencapaian standar proses maka semakin tinggi pula pencapaian SKL. Namun, hanya pencapaian standar proses yang memiliki pengaruh yang signifikan dan paling bermakna terhadap pencapaian standar SKL. Capaian standar yang paling kecil pengaruhnya terhadap SKL adalah capaian standar sarpras.

Berdasarkan capaian rapor mutu pada jenjang Sekolah Dasar, dari 7 standar (isi, proses, PTK, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pembelajaran) mampu memprediksi capaian SKL sebesar 70,7%. Sisanya sebesar 29,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain, selain capaian dari ke-7 standar tersebut.

3. Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menjadi tokoh sentral untuk memberikan bimbingan kepada anak usia SD. Keberhasilan pendidikan pada tingkat SD diduga lebih banyak dipengaruhi oleh guru yang profesional. Hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa hubungan antara capaian proses dengan kompetensi profesional bernilai positif (0,091) dan signifikan pada level 0,05. Artinya, setiap peningkatan kompetensi profesional guru, akan diikuti dengan peningkatan proses pembelajaran. Demikian pula dengan capaian proses dengan kompetensi pedagogik yang bernilai positif (0,076) dan signifikan pada level 0,05. Artinya, setiap peningkatan kompetensi pedagogik guru, akan diikuti dengan peningkatan proses pembelajaran. Meskipun hubungan kedua variabel tersebut termasuk kategori lemah.
4. Berdasarkan hasil FGD dengan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah disimpulkan bahwa SPMI dapat

dirasakan manfaatnya dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran. Pada tataran implementasi, setelah adanya SPMI sekolah menunjukkan adanya perubahan terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Perubahan proses pembelajaran tersebut berpengaruh pada capaian hasil belajar yang lebih efektif.

Sekolah mengakui setelah adanya SPMI, manfaat yang diterima antara lain rasa kebersamaan memiliki sekolah yang tinggi dalam rangka memajukan sekolah dan terjadinya peningkatan kedisiplinan guru dan siswa di sekolah. Terjadi perubahan pada mutu/*output* yang lebih baik secara akademik maupun non akademik, terjalannya kerja sama antara guru-sekolah-orang tua secara lebih harmonis.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pengimplementasian SPMI antara lain terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah (akses internet, ruang belajar) serta kesadaran rasa memiliki sekolah oleh guru dan tenaga kependidikan. Kendala lainnya sekolah yang belum masuk kategori sekolah model belum mendapat sosialisasi dan waktu menerima instrumen serta penyerahan kembali instrumen waktunya terbatas sehingga pengisian instrumen SPMP kurang cermat.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan capaian rapor mutu yang dihasilkan menunjukkan bahwa capaian SNP hampir semuanya masih di bawah standar maka diperlukan langkah strategis terhadap capaian standar yang masih memiliki nilai rendah. Oleh karena itu, agar pemerintah (Pusat dan Daerah) tetap

memprioritaskan pada bantuan-bantuan terhadap capaian standar yang masih rendah pada jenjang pendidikan SD.

2. SKL banyak dipengaruhi oleh ketercapaian 7 standar (isi, proses, PTK, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pembelajaran). Oleh karena itu, dalam implementasi pada satuan pendidikan khususnya pada SD peran dari 7 SNP perlu mendapat prioritas terutama ketercapaian standar PTK yang berperan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Dalam analisis menunjukkan bahwa standar PTK berkontribusi signifikan dalam mencapai keberhasilan proses belajar. Artinya, pendidik atau guru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan siswa belajar. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru diperlukan sekali dalam mencapai keberhasilan guru mengajar. Dengan demikian, peningkatan kapasitas guru melalui diklat dan model pelatihan yang efektif diperlukan bagi guru.
4. Sesuai masukan dari guru, kepala sekolah, dan pengawas, merasakan berat dengan instrumen yang terlalu banyak sehingga dalam pengisian kurang cermat karena kejenuhan responden. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali isi instrumen supaya tidak menyulitkan bagi responden untuk memahami bahasa dan makna butir-butir pertanyaan pada instrumen tersebut. Untuk itu, perlu ditata ulang butir-butir pertanyaan pada instrumen agar mudah dipahami oleh responden.

### **C. Rekomendasi Kebijakan**

1. Adanya perbedaan penilaian ketercapaian SNP antara hasil Tim SPMP Dikdasmen dengan Akreditasi dari BAN-SM, maka opsi kebijakan sebagai berikut:
  - a. Diperlukan adanya sinkronisasi instrumen yang dibuat oleh Tim SPMP Dikdasmen dengan BAN-S/M. Hal tersebut agar data yang diperoleh dari TIM SPMP dapat menjadi prediksi kekurangan pada setiap indikator standar sesuai yang didapatkan dari akreditasi BAN-S/M. Apabila sudah dilakukan sinkronisasi maka hasil rapor mutudapat menjadi landasan atau dasar melakukan akreditasi standar bagi BAN- S/M. Dengan demikian, akreditasi bisa diprioritaskan bagi sekolah yang mendapatkan penilaian rapor mutu pada kategori menuju SNP 4 atau kategori menuju SNP 3.
  - b. Validasi instrumen SPMP yang dibebankan kepada pengawas sekolah dibatasi jumlah sekolah yang di validasi. Artinya, pengawas sekolah diberikan beban terbatas untuk memvalidasi instrumen. Hal ini supaya fungsi validasi pengawas sekolah dapat dipertanggungjawabkan tingkat akurasi dan kecermatannya.
  - c. Menambah petugas validasi dari LPMP atau tenaga dari luar seperti mahasiswa sebagai petugas validasi instrumen SPMP. Hal ini untuk meningkatkan tingkat akurasi data yang masuk sebagai rapor mutu pada satuan pendidikan yang penyebarannya cukup luas.
  - d. Memastikan setiap satuan pendidikan ada petugas operator komputer yang bertanggung jawab terhadap

input data instrumen SPMP.

2. Ketercapaian SKL banyak ditentukan oleh ketercapaian 7 standar lainnya (isi, proses, PTK, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pembelajaran), maka opsi kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan SNP yang menjadi tugas satuan pendidikan, yaitu pemenuhan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, dan SKL.
  - b. Pemenuhan SNP menjadi tugas pemerintah (Pusat dan Daerah) yang harus dipenuhi, yaitu standar PTK, standar sarpras dan standar pembiayaan.
3. Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar, maka opsi kebijakan sebagai berikut:
  - a. Memperkuat LPTK sebagai penghasil lulusan calon guru untuk memberikan proses pembelajaran calon guru yang memenuhi standar guru yang akan dihasilkan. Artinya, selama proses pembelajaran calon guru sudah ditanamkan profesionalisme yang memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Calon guru seharusnya mendapat praktik mengajar lebih banyak daripada materi teori di kampus.
  - b. Memberdayakan Lembaga Diklat Guru untuk menyelenggarakan pelatihan guru dengan model pelatihan guru inti yang dapat mengimbaskan pada kelompoknya. Guru inti yang sudah mendapatkan pelatihan mempunyai kewajiban mengimbaskan

kemampuannya pada KKG untuk SD dan MGMP untuk sekolah SMP dan SMA. Hal ini sebagai langkah efisiensi anggaran dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan guru.

4. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah merasakan manfaatnya dengan diimplementasikan SPMI, maka opsi kebijakan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi masih dirasakan kurang bagi SD untuk implementasi SPMI. Perlu ada forum-forum tertentu untuk memberikan wadah sosialisasi pelaksanaan SPMI pada tingkat rayon kecamatan, kabupaten dan kota. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman konsep SPMI yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan budaya mutu.
  - b. Pendampingan bagi sekolah yang belum menjadi Sekolah Model atau Sekolah Rujukan. Hal ini diperlukan bagi sekolah yang memiliki motivasi tinggi dalam peningkatan mutu pembelajaran.
  - c. Penunjukan Sekolah Model perlu dicermati kembali karena sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Model ada yang belum memiliki kepercayaan diri karena prestasi Sekolah Model yang ditunjuk jika dibandingkan dengan sekolah yang menjadi imbasnya merasa masih di bawah sekolah imbasnya.
  - d. Instrumen SPMP untuk mendapatkan rapor mutu pada satuan pendidikan perlu ada penyederhanaan, responden merasakan kejenuhan dalam pengisian sehingga berakibat pada ketidakcerahan dalam pengisian instrumen SPMP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mukti, Abdul. 2017. *Eksekutif Summary Hasil Akreditasi BAN- SM Tahun 2012 s.d 2017*.
- Albrecht & Zemke dalam Rochaety. 2005. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Accreditation and Quality Assurance in America.*  
<https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-accreditation.html>.
- Accreditation and Quality Assurance in Eropa*  
[http://ecahe.eu/w/index.php/Quality\\_assurance\\_and\\_accreditation\\_in\\_Europe](http://ecahe.eu/w/index.php/Quality_assurance_and_accreditation_in_Europe).
- Asia *Education Quality Assurance*  
<https://news.detik.com/berita/1510837/sistem-penjaminan-mutu-ri-diakui-negara-negara-asean>.
- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education*, terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCISOD, 2006
- Hoys Charles, Jardin Colin Bayne, Margaret Wood. 2005. *Improving Quality in Education*. London and New York: Falmer Press.
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Fattah, Nanang. 2012. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya

- Kemdiknas. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63, Tahun 2009 tentang Sistem. Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta.
- Kemendikbud. 2016. Permendikbud Nomor 28, Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education*. London and USA: Kogan Page Ltd.
- Sagala, Syaiful. 2010. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
- Sudarwan, Deanim. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanik, Umi. 2011 *Implementasi Total Quality Management Dalam Meningkatkan Pendidikan*, Semarang: Rasail media Group.
- Republik Indonesia. 2003. Undang Undang Nomor 20, Tahun 2003
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013
- Republik Indonesia. 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 13, Tahun 2015







Laporan hasil penelitian dengan judul Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan disusun dalam rangka menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan dalam memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa hasil penilaian rapor mutu masih menunjukkan belum seluruhnya memenuhi kategori Standar Nasional Pendidikan, SKL adalah standar yang sangat penting dalam mewujudkan mutu pendidikan secara nasional, Guru sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan SPMI memberikan manfaat dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan opsi kebijakan untuk perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bagi stakeholder terkait.

